BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan. (Perwita & Yani, 2005: 3).

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu hubungan internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, Ilmu hubungan internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya actor IGO (*Intergovermental Organizations*) dan INGO (*InterNongovermental Organizations*). Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-

negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor buka negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (Perwita & Yani, 2005: 3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Paska Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme). Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 7-8).

2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok dalam hubungan internasional. Politik internasional memiliki perbedaan dengan hubungan internasional dalam ruang lingkupnya. Hubungan internasional meliputi seluruh bentuk interaksi antar negara, termasuk organisasi non-negara. Sedangkan politik

internasional terbatas hanya pada hal-hal yang berfokus pada kekuasaan yang melibatkan negara-negara berdaulat.

Menurut Holsti, politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *power*, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi (Holsti dalam perwita & Yani, 2005: 40).

Secara umum, objek dalam politik internasional juga merupakan objek dari politik luar negeri. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri,dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa (Perwita & Yani, 2005:41).

Dalam politik internasional proses interaksi berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi serta *interplay* (saling

mempengaruhi) antara aktor dengan lingkungannya atau sebaliknya. Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara. Namun, pola-pola interaksi interaksi politik dalam hubungan internasional kini sudah melibatkan interaksi antar aktor negara dengan aktor non-negara. (Perwita & Yani, 2005:41).

2.3 Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 418).

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam system internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mangajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi

semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi (Holsti, 1992: 650).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Afrika. Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagau usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 419).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus

ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993: 3).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia.
3. Perubahan sifat peperangan, dimana, terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. (Kartasasmita,1997:2).

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu:

1. Kerjasama universal (global)

   Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerjasama regional

   Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa, faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan.

3. Kerjasama fungsional

   Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dan yang idealnya pada saat yang bersamaa merupakan kelemahan yang spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya. (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

4. Kerjasama ideologis

   Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

   Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat. (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

2.4 Konsep Peranan Negara

Teori peranan menegaskan bahwa prilaku politik adalah prilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar prilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berprilaku tertentu. Harapan dan dugaan itulah yang membentuk peranan. Peranan

memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social dalam masyarakat (Soekanto,1990:269).

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu:

> “Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi” (1992:159)

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang

pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur social. Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira,1987:32).

2.5 Organisasi Internasional

2.5.1 Definisi dan Klasifikasi Organisasi Internasional

Upaya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara (Coulombis & Wolfe, 1986:276).

Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotannya (Archer, 1983:35).

Definisi lain dari organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur

organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesame kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993: 3).

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan, organisasi internasional ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia. (Archer, 1983:35).

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara,

komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bennet, 1995: 9).

IGO dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan social-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah OKI, Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wolfe, 1999: 281).

INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun, kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasional (Archer, 1983: 40).

Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu, menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota.

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotannya

yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan (Archer, 1983: 66-67).

2.5.2 Fungsi-fungsi Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotannya. Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotannya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah (Bennet, 1995: 9).

Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

   Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

   Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan

   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. (Bennet, 1995: 9).

2.5.3 Teori Peranan Dalam Organisasi Internasional

Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peranan dari struktur tunggal, maupun bersusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001: 268).

Teori peranan menegaskan bahwa, perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan (Mas'oed, 1990: 45).

Munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis, yang paling penting adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik (Mas'oed, 1990: 46-47).

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini bergantung pada posisi dan kedudukan struktur tersebut dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta kemampuan dari si pemegang peran. (Mas'oed, 1990: 46-47).

2.5.4 Peranan Organisasi Internasional

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1995: 8).

2.6 Teori Aliansi

Aliansi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengejar kepentingan nasional sepanjang aliansi Negara meliputi : aliansi umum yang merupakan kepentingan biasa dan umumnya untuk waktu yang singkat, Negara akan terlibat dalam suatu aliansi untuk memenuhi kepentingan primer dan sekunder sapanjang bermandaat untuk proposisi yang baik bagi kekuatan Negara, Negara-negara yang lemah dan

tergantung bergabung menjalin persetujuan itu merupakan identitas kepentingannya, saling mengenal kepentingan amat diperlukan sebagai dasar persamaan aliansi. Aliansi dapat bersifat bilateral atau multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau terorganisasikan, jangka pendek atau jangka panjang, dan dapat digunakan untuk mencegah atau memenangkan perang. Walaupun aliansi dapat membantu menciptakan perasaan aman dan menangkal agresi, aliansi dapat juga menjadi sumber ketegangan internasional. Hal ini disebabkan upaya pembentukan aliansi tandingan cenderung mengakibatkan terjadinya perlombaan senjata, timbul krisis atau perang.

B.N. Marbun dalam bukunya yang berjudul *Kamus Politik*, menjelaskan makna aliansi sebagai:

> "Suatu kerjasama antara bangsa-bangsa yang terbentuk dalam organisasi atau komitmen sejenis Negara untuk melakukan tindakan kooperatif, jika salah satu yang terlibat dalam perjanjian itu diserang oleh Negara lain" (Marbun,2003:16).

Aliansi merupakan suatu yang sifatnya sangat strategis. Dengan terbentuknya aliansi, suatu kawasan dapat lebih terjaga stabilitas, baik secara politik, ekonomi, dan keamanan.

2.7 Konsep Peradaban

Konsep tentang peradaban (pembahasannya) harus meliputi semua dimensi kehidupan manusia, factor-faktor utama pendorong dan penyusunan peradaban,

alur proses pembentukannya, uraian tugas dan proyek yang paling krusial, strategi dan pendekatan dalam upaya pembangunannya, dan titik-titik prioritas dan kritis.

Model dan konsep peradaban dari peradaban Islam gelombang kedua ini penting dirumuskan karena karakter dan model peradaban Islam seiring dengan berlalunya waktu, peradaban Islam itu tidak lagi dapat menjawab tantangan-tantangan zaman yang kemudian datang. Ruang dan waktu di mana peradaban ini akan dilahirkan akan sama sekali berbeda (yang dipengaruhi karakter dan budaya masyarakat). Peradaban barat yang ada kini telah terbukti merusak ketinggian derajat manusia, kelestarian alam, dan mendesaknya keperluan akan solusi kreatif eksklusif atas masalah kemanusiaan kontemporer.(www.sinarharapan.co.id/berita /0708/21/lua07.html)

Konsep-konsep tentang pembangunan peradaban Islam gelombang kedua hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur ketika tidak ada orang-orang yang mampu mentransfernya kea alam realitas. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu menerjemahkan konsep-konsep peradaban yang dimaksud kedalam system tata Negara, kepada pasal-pasal hukum, kepada rumusan kurikulum pendidikan, kepada model pembangunan fisik, kepada tehnik bisnis dan investasi, kepada pendekatan ekonomi dan manajemen, kepada penciptaan teknologi baru, kepada trend dan standar apresiasi karya-karya seni, kepada perilaku manusia dan tradisi budaya masyarakat, kepada metode empiris-ilmiah, kepada praktek politik praktis, kepada praktek diplomasi antar Negara, kepada resolusi-resolusi dan draft hukum internasional, dan kepada sistem birokrasi. Para teknisi peradaban ini pula yang melakukan identifikasi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan pada

setiap tahap pembangunan peradaban baru. Akhirnya mereka pula yang akan mengambil peran sebagai administrator pada sistem peradaban ini. Tentu saja kita membutuhkan semacam sistem dan organisasi untuk menjembatani dan mensinergikan kerja arsitek peradaban dan tehnisi peradaban. Tanpa system dan organisasi ini, pembangunan peradaban tidak akan menghasilkan pola dan bentuk yang indah dan rapi. Seperti bata-bata yang tersusun secara acak. Yang mana tak ada satupun yang tahu gambar besarnya. Yang mana semua anasir peradaban akan bekerja tanpa tahu bentuk akhir yang akan dituju.(www.ramadhany.wordpress. com/2007/06/05/teknisi-peradaban/).

Apapun profesi kita sekarang, dan dimanapun kita bekerja, kita sudah harus mengidentifikasi diri untuk mengambil peran tertentu dalam proyek peradaban ini. Apakah akan menjadi arsitek peradaban, teknisi peradaban, ataukah pekerja peradaban. Mulai merumuskan kontribusi apa yang bisa diberikan kepada upaya membangun peradaban islam baru ini. Apakah akan berperan sebagai konseptor, inventor, pengusaha, ataukah sebagai militer. Dimanapun kita berada kini, kita harus gunakan kesempatan yang ada untuk menyerap kekuatan dari lingkungan. Jangan terlena dengan keadaan. Kekuatan yang kita serap itu akan kita baktikan untuk peradaban baru ini.

2.8 Konsep Peradaban dan Konsep Kebudayaan

Budaya, di dalam ilmu antropologi adalah pola teladan perilaku dan pola pemikiran orang-orang yang tinggal di suatu kelompok social yang saling belajar, menciptakan, dan saling berbagi tentang berbagai hal. Budaya membedakan

kelompok manusia dari kelompok manusia lainnya. Budaya juga membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya seperti binatang. Suatu budaya masyarakat dapat meliputi kepercayaan mereka, peraturan tentang prilaku, bahasa, upacara atau ritual agama, seni, teknologi, gaya pakaian, cara memproduksi sesuatu, makanan, agama, politik dan system ekonomi. (Joesoef,2000)

David Joesoef berpendapat kebudayaan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau sifatnya budaya. Sedangkan budaya itu sendiri adalah system nilai yang dihayati. Nilai dapat terbentuk seperti bangunan bersejarah, karya seni, patung, dan lainnya, serta juga tidak berbentuk seperti adat-istiadat, tradisi, kebiasaan normative, moral, etika, harga diri, kepercayaan, disiplin, gagasan, pegangan hidup, nalar, semangat ilmiah, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Dalam sebuah buku teks antropologi yang telah digunakan secara umum, ditemukan tidak kurang dari 11 definisi tentang kebudayaan. Buku yang lain meninjau tidak kurang 160 definisi kebudayaan yang digunakan oleh para antropolog, sosiolog, psikolog dan disiplin ilmu lainnya (Fukuyama,1995), (Joesoef,2000). Para antropolog bersihkukuh bahwa tidak ada apek-aspek kebudayaan yang umum bagi seluruh masyarakat manusia. Factor-faktor budaya oleh karenya tidak dapat disistemasikan melalui hukum-hukum universal, mereka hanya dapat di interpretasikan melalui apa yang disebut "*thick description*" atau deskripsi tebal.

Kebudayaan atau *culture* adalah konsep yang paling utama di dalam ilmu antropologi yang mempelajari semua aspek hidup manusia, masa lampau dan kini. Kata culture diambil dari bahasa latin "cultura" yang sepadan dengan makna

“cultivation” yang menyatakan hubungan spesifik antara manusia dengan alam. Pakar antropologi biasanya menggunakan istilah kebudayaan untuk mengacu pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang cukup besar atau semua orang-orang yang tinggal atau hidup dan berpikir dengan cara yang sama. Sedangkan, kelompok orang yang memiliki kebudayaan yang sama dan khususnya tentang aturan umum perilaku dan bentuk dasar organisasi social didefinisikan sebagai suatu masyarakat atau society. Istilah kebudayaan (culture) dan masyarakat (society) kadang-kadang maknanya digunakan terbalik. (Fukuyama,1995)

Kebudayaan mempunyai bebrapa karakteristik pembeda, diantaranya:

1. Didasarkan pada symbol-simbol dan cara-cara abstrak mengacu pada pemahaman akan gagasan, objek, perasaan, atau prilaku dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan symbol yang menggunakan bahasa.
2. Kebudayaan bersama, orang-orang dalam masyarakat yang sama saling berbagi cara pikir dan perilaku umum melalui budaya.
3. Kebudayaan dipelajari, sementara orang-orang yang secara bilogis menerima warisan berupa cirri fisik dan naluri tingkah laku, budaya secara social menerima warisan. Seseorang harus belajar kultur dari orang-orang lainnya dalam suatu masyarakat.
4. Kebudayan adalah dapat beradaptasi. Orang-orang menggunakan budaya dengan fleksibel dan dengan cepat melakukan penyesuaian ke perubahan di dunia di sekitar mereka. (Fukuyama,1995)

Peradaban adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kesatuan budaya dan sejarah. Dalam pengertian lain peradaban merupakan jenjang keberadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu kebudayaan, ia adalah artificial, tidak metafisis, tidak berjiwa, dikuasai oleh intelek (Joesoef,2000). Sejarawan menemukan berbagai kesulitan di dalam mendefinisikan peradaban dengan mengelompokan masyarakat tertentu atau dengan label yang tepat, apakah suatu peradaban atau tidak, mereka menggunakan istilah peradaban untuk mengacu pada sejumlah sejarah masa lampau dan masyarakat kini yang menjelma pola-pola teladan historis dan budaya yang saling berbeda. (Joesoef,2000)

2.9 Peradaban Islam

Peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, dan ilmu pengetahuan, serta meliputi juga kebudayaan yang memilliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Dengan kata lain peradaban Islam bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup di dunia dan di akhirat.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Islam dalam menegakkan peradabannya tidak hanya memandang satu sisi kehidupan dunia dengan pencapaian kebudayaan yang dapat memajukan peradabannya, akan tetapi juga memperhatikan prinsip pencapaian kebahagiaan kehidupan akhirat, dengan memberikan ajaran dengan cara berkehidupan yang bermoral dan santun dalam memandang keberagaman dunia. (Amien,2009)

Dalam memahami peradaban Islam, amat penting untuk mengingat tidak hanya keragaman seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga keragaman interpretasi teologis dan filosofis pada doktrin-doktrin Islam, bahkan pada bidang hukum Islam. Tidak ada kesalahan yang serius daripada pendapat yang menegaskan bahwa Islam adalah realitas yang seragam, dan peradaban Islam tidak mengapresiasi ciptaan atau eksistensi beragam. Meskipun kesan adanya keseragaman sering mendominasi segala hal yang berkaitan dengan Islam, sisi keragaman di bidang interpretasi agama itu sendiri selalu ada, sebagaimana juga terdapat aspek beragam pada pemikiran dan kultur Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad saw sebagai pembawa ajaran Islam, menganggap bahwa keragaman pendapat para pemikir Muslim adalah sebuah karunia Tuhan. Namun dengan segala keberagamannya tersebut, masih saja terlihat kesatuan yang amat mengagumkan tetap mempengaruhi peradaban Islam, sebagaimana hal tersebut telah mempengaruhi agama yang melahirkan peradaban itu, dan membimbing alur sejarahnya selama berabad-abad. (Amien,2009)

Demikianlah Islam dengan ajaran suci dan universal sebagaimana yang telah diwahyukan, mengalami perkembangan dari masa ke masa. Adapun penyebaran Islam dan torehan peradabannya ke penjuru dunia, tak kan lepas dari metode dan sistem penyebarannya, mulai dari perdagangan, korespondensi (seperti yang dilakukan Rasulullah dengan mengirim surat kepada para raja Mesir, Persia, dll.), diplomasi politik, sampai pada peperangan perebutan kekuasaan dan pendudukan wilayah.

Sedangkan periode penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah saw pada abad ke-6 M hingga saat ini, terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. (Amien,2009)

2.10 Benturan Peradaban (Tesis Samuel Hutington "*Clash Of Civilization*")

Dalam tesis Hutington ini yang melihat Islam dan Barat sebagai dua peradaban yang saling berbenturan, ada banyak kalangan yang kemudian mempertanyakan : *the clash of civilization or the clash of interest ?* pertanyaan ini wajar adanya mengingat penelitian yang pernah dilakukan oleh Fawaz A. Gerges (2000:27-30) yang menunjukan peta tentang polarisasi kaum intelektual di Amerika. Menurut Fawaz, kelompok intelektual Amerika sebenarnya terbagi ke dalam dua kelompok : Konfrontasionis dan akomodasionis. Kelompok pertama selalu mempersepsi Islam dengan pencitraan yang negatif. Dengan kata lain, mereka selalu menganggap islam sebagai *the black side of the world*. Islam selalu diposisikan sebagai ancaman bagi demokrasi dan lahirnya tatanan dunia yang damai. Eksponen yang termasuk kelompok ini misalnya, Almos Perlumetter, Samuel Hutington, Gilles Kepel, dan Bernard Lewis.

Sementara kelompok akomodasionis justru menolak diskripsi Islamis yang selalu menggambarkan Islam sebagai anti demokrasi. Mereka membedakan antara tindakan-tindakan kelompok aposisi politik Islamis dengan minoritas ekstrim yang hanya sedikit jumlahnya. Diantara kelompok ini terdapat nama John L. Esposito dan Leon T. Hadar. Bagi mereka, di masa lalu maupun di masa sekarang,

ancaman Islam sebenarnya tidak lain adalah mitos Barat yang berulang-ulang (Fawaz, 2000:30). Sehingga mereka, meminjam istilah mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Mahatir Muhammad, takut dengan bayangannya sendiri.

Tesis Hutington sebenarnya bagian dari rekomendasi bagi pemerintahan Amerika Serikat untuk membuat peta tata dunia baru di planet bumi. Hutington dalam hal ini ingin mengingatkan pemerintah AS untuk waspada terhadap ancaman baru pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet.

Pada sisi lain, Barat, menurut sebagian pengamat, dalam hal ini Amerika serikat, jelas merupakan pihak yang paling merasa "diamini" secara ilmiah oleh Hutington, khususnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Betapa tidak, dengan tesis benturan antar peradaban ini, Barat yang telah lama terbiasa dengan visi global dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada persaingan antar negara adidaya dalam berebut mendapatkan pengaruh dominasi global, semakin tergoda untuk mengidentifikasi ancaman ideologi global lainya seperti Islam dan Konfusius dalam rangka mengisi "kekosongan ancaman" yang timbul pasca runtuhnya komunisme.

Bukti otentik adanya "faktor kepentingan" yang menyertai tindakan Barat (Amerika) dalam aksi-aksi politik dan militer yang menyebabkan timbulnya *clash* antara Barat dan beberapa Negara Islam adalah fenomena Perang Teluk jilid II di Irak. Dengan dalih memerangi terorisme dengan menumbangkan kekuasaan Saddam Husein yang dinilai melindungi para teroris, ujung-ujungnya adalah penguasaan sumber-sumber minyak yang konon kandungannya nyaris sepadan dengan yang dipunyai Arab Saudi. Lebih dari itu, dengan runtuhnya pemerintahan

Saddam di Irak, akan lebih mengukuhkan hegemoni AS sebagai satu-satunya kekuatan adidaya di muka bumi ini yang berhak berbuat apa saja untuk melaksanakan kepentingan globalnya.

Cendikiawan terkemuka muslim lain yang pendapatnya selaras dengan asumsi ini adalah Muhammad Abel al-Jabiri (1999:73), Guru Besar Filsafat dan Pemikiran Islam-Arab pada Muhammad V University Maroko. Sepanjang sejarah, menurut Al-Jabiri, hubungan antar peradaban tidak bersifat konfrontasi, tetapi interpenetrasi. Bahkan konfrontasi dan konflik lebih sering dan destruktif dibandingkan konfrontasi antar Negara-negara dengan peradaban berbeda. Buktinya, dua kali perang dunia terjadi dalam peradaban Barat, disebabkan oleh konflik kepentingan (*conflicts of interests*).

Kepentingan global Barat sesungguhnya adalah dominasi ekonomi dan politik atas seluruh negara non-Barat. Untuk melancarkan kepentinganya itu, Barat memakai banyak cara, dari yang paling halus sampai yang paling berdarah-darah. Cara halus Barat mengukuhkan hegemoninya diantaranya melalui rezim pengetahuan. Rezim pengetahuan yang diciptakan Barat tidak memberi ruang yang bebas kepada pengetahuan lain untuk berkembang. Generasi terdidik di Negara berkembang diarahkan sedemikian rupa menjadi agen dan penjaga system pengetahuan Barat. Dan bukan hanya cara berfikir saja yang diarahkan, tetapi gaya hidupnya pun dikendalikan.

Hegemoni pengetahuan Barat terlihat jelas ketika kaum terdidik di Negara berkembang dengan setia dan tidak sadar menyebarkan dan membela nilai-nilai dan institusi Barat seperti demokrasi, *civil society*, hak asasi manusia. Semua yang

datang dari Barat diterima sebagai nilai-nilai universal yang merupakan produk peradaban terbaik yang harus diikuti. (Jabiri,1999:73)